


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------|
|  | UNIVERSITAS PAKUAN | | | | |
| | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | | | | |
| | SI AKUNTANSI | | | | |
| | RENCANA PEMBELAJARA SEMESTER | | | | |
| MATA KULIAH | KODE | RUMPUN MK | BOBOT (SKS) | SEMESTER | Tgl Penyusunan |
| Akuntansi Pemerintah | | Mata Kuliah Pengetahuan | 3 | 5 | 2020 |
| Dekan FEB | DOSEN PENGEMBANG RPS | KOORDINATOR RMK | KA PRODI | | |
| Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM. | Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak. Ahmad Burhanudin Taufiq, Ak., ME., CA Sigit Edy Surono, Drs., M.M. | Sujatmiko Wibowo, ST. M.Ak. | Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. | | |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI | | | | |
| | S 4 : Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; PIKP 3: Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang akuntansi sektor publik (PIKP 3) | | | | |
| | CP-MK | | | | |
| | M1. Mampu bertanggungjawab dalam ruang lingkup akuntansi Pemerintahan .(S 4) M2. Mampu Mengerti kerangka konseptual akuntansi Pemerintahan (PIKP 3) M3. Mampu Membuat dan menyajikan pelaporan keuangan Pemerintahan (PIKP 3) | | | | |
| Deskripsi Singkat MK | Mata kuliah ini bermaksud meningkatkan kompetensi Mahasiswa, diharapkan Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka konsepsi dan prinsip yang berlaku dalam lingkungan akuntansi pemerintah dan organisasi nirlaba meliputi peranan akuntansi dalam rangka akuntabilitas, akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen, akuntansi keuangan & akuntansi dana dan praktek akuntansi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Secara lebih khusus mata kuliah ini berisi kajian konsep akuntansi sektor publik serta mekanisme | | | | |

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

| | |
|-----------------------------------|---|
| | pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi yang tepat |
| Materi Pembelajaran/pokok Bahasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan (Mg 1) 2. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) (Mg 2) 3. Mekanis Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBD (Mg 3,4, 5) 4. Akuntansi Penyusutan Aset tetap dan pemungutan PPN dan PPh atas beban APBD (Mg 6, 7) 5. Standar Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (Mg 9) 6. Akuntansi Keuangan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) (Mg 10, 11) 7. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Mg12, 13 14) 8. Penilaian atas kinerja keuangan pemerintah Daerah kabupaten/kota (Mg 15, 16) |
| Pustaka | <ul style="list-style-type: none"> ● Drs Nurlan Drise AK, Msc Akuntansi Keuangan Pemerintah ● Dr Indra Bastian Ak Akuntansi sector public ● DR Mardiasmo Akuntansi Sektor Publik ● Abdul Halim Akuntansi Sektor Publik |
| Media Pembelajaran | Ceramah , Diskusi , Power Point, LCD Proyektor, OHP Proyektor, LMS |
| Team Teaching | - |
| Matakuliah syarat | Akunatansi Sektor Publik |

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

| Pert. ke | Sub-CP-MK/ Indikator | PokokBahasan | MetodePembelajaran | PengalamanBelajar | TeknikPenilaian | BobotPenilaian (%) |
|----------|---|---|---|---|-------------------|--------------------|
| 1 | Mampu memahami realitas dan fenomena akuntansi sektor publik dari hari ke hari senantiasa dituntut untuk bekerja secara akuntabel dengan mengedepankan kejujuran dan profesionalisme dalam segala hal, baik SDM, pengelolaan, maupun yang terpenting manajemen keuangan dengan tujuan keberadaan. | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan ● Elemen-Element dan Lingkup Organisasi Pemerintahan ● Value For Money dari Keuangan Negara ● sistem dan Standar akuntansi Pemerintahan (PP.71 tahun 2010) | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 1: Merangkum materi [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana realita dan fenomena akuntansi sector public yang, dan bagaimana seorang akuntan public dituntut untuk bertanggungjawab dengan mengedepankan kejujuran | Membuat rangkuman | 5 |
| 2 | Mampu memahami bahwa ABK dibuat dalam rangka memberikan acuan untuk menjadi control bagi setiap pelaksanaan operasional ke depan. Yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rensra Serta Rencana Kerja Satuan Kerja | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi Anggaran Berbasis Kinerja ● Prosedur penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja ● Bentuk form dari Anggaran Berbasis Kinerja ● Contoh anggaran Berbasis Kinerja | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 2: Membuat Makalah dan PPT [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat berdiskusi dengan tanya jawab setelah proses presentasi 2. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan akuntan public dengan akuntan keuangan | Makalah | 15 |

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---|-----------------------------------|----|
| | Pemerintah Daerah (Renja SKPD) | | | | | |
| 3-5 | Mahasiswa dapat mengetahui bahwa Mekanis Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban me APBD dibuat dalam rangka memberikan acuan untuk menjadi control bagi setiap pelaksanaan operasional ke depan.dalam rangka pelaksanaan pembayaran APBD yang berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Pembayaran (DPA.atau DIPPA) | <ul style="list-style-type: none"> ● Dasar hukum mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD ● Sistem dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD ● Jurnal yang diperlukan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD ● Contoh soal mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 4: Studi Kasus [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat mengetahui tentang APBD, DPA atau DIPPA | Membuat Forum Diskusi Studi Kasus | 10 |
| 6-7 | Mampu menjelaskan pedoman Penyusutan pada Aset tetap Pemerintah Daerah dan ketentuan pemungutan / penyeteroran PPN dan PPh dibuat dalam rangka memberikan acuan untuk menjadi control bagi setiap | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi, dan ruang lingkup Penyusutan pada Aset tetap Pemerintah Daerah ● Definisi dan ruang Lingkup dari aset tetap yang disusutkan | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 5: Mengisi soal-soal terkait perhitungan dan penyeteroran PPN [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat mengetahui pedoman yang ditentukan untuk penyusutan aset tetap pemerintah daerah | Tes | 5 |

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|-----------|---|
| | pelaksanaan operasional ke depan.dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> ● Jurnal yang diperlukan dalam penyusutan aset tetap serta pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh ● Contoh soal penyusutan aset tetap dan PPN/ PPh | | | | |
| 8 | UJIAN TENGAH SEMESTER | | | | | |
| 9 | Mampu menjelaskan standar akuntansi dan jenis laporan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi, dan ruang lingkup PP.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ● Kebijakan akuntansi pada PP 71 tahun 2010 ● Jenis jenis laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 ● Contoh contoh bentuk laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 6: Rangkuman [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat mengetahui standar apa saja yang dijadikan acuan dalam akuntan public dan jenis laporan keuangan apa saja yang ada pada pemerintahan | Tes Lisan | 5 |

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|-----|----|
| 10-11 | Mampu menjelaskan standar akuntansi dan jenis laporan keuangan Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi Satuan Kerja Pemerintah Daerah ● Jenis laporan Keuangan SKPD ● Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP 71/2010 dan Kepmendagri no 13 tahun 2006 beserta penyempurnaan nya ● Contoh penyusunan Laporan keuangan SKPD | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 7: Membuat PPT [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | 1. Mahasiswa dapat menggambarkan bagaimana proses SKPD | PPT | 15 |
| 12-14 | Mampu menjelaskan standar akuntansi dan jenis laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota | <ul style="list-style-type: none"> ● Definisi Satuan Kerja Pemerintah Daerah ● Jenis laporan Keuangan Pemda Kabupaten/kota ● Kebijakan Akuntansi berdasarkan PP 71/2010 dan Kepmendagri no 13 tahun 2006 beserta | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 8: Mengisi Soal-Soal Essay [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | ● Kuliah dan Diskusi | Tes | 5 |

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS**

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-----|----|
| | | <p>penyempurnaan nnya</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Contoh penyusunan Laporan keuangan Pemda Kabupaten kota | | | | |
| 15 | Mahasiswa dapat mengenal pentingnya penilaian atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota | <ul style="list-style-type: none"> ● Arti pentingnya penilaian kinerja keuangan ● Analisis rasio pendapatan , belanja dan pertumbuhan keuangan pemerintah kabupaten/ kota ● Contoh soal penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi [TM: 1(3x50'')] ● Tugas 9: Quiz [BT: 1(3x60'')] ● [BM: 1(3x60'')] | <ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi | PPT | 10 |
| 16 | UJIAN AKHIR SEMESTER | | | | | |

Catatan :

TM : Tatap Muka, BT : Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri